

# EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GERAKAN SATU RUMAH SATU JUMANTIK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

Siti Raudah<sup>1</sup>, Eka Handayani<sup>2</sup>, Deni Suryanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM12007010384

<sup>2</sup> Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1106108501

<sup>3</sup> Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1108098601  
Email: siti.raudahp2p@gmail.com

## ABSTRAK

Gerakan 1R1J di Kabupaten Tabalong telah dimulai pada tahun 2016 yang dituangkan dalam inovasi Sapu Aja DBD dengan pelaksanaan kegiatan Abatisasi Massal Daerah Endemis oleh juru memantau jentik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan utama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan Kepala Puskesmas. Informan triangulasi adalah Kepala Desa, Kader Jumantik dan Jumantik Rumah. Hasil penelitian komponen input : sumber daya manusia yaitu kader jumantik, sumber dana yaitu APBD, DAK, BOK dan dana Desa, sarana prasarana berupa pemberian bubuk abate. Komponen proses : perencanaan yaitu penambahan jumlah kader jumantik pada setiap RT/Desa, pelaksanaan yaitu terdapat hasil laporan jentik berkala oleh kader jumantik per 3 bulan. Komponen output : monitoring yaitu peran kader memiliki pengaruh besar dalam memberikan sosialisasi G1R1J terbukti angka penurunan kesakitan dan kematian kasus DBD, evaluasi yaitu penambahan cakupan kawasan lomba bebas jentik. Saran perluasan cakupan lomba bebas jentik serta lebih aktif kader jumantik dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat minimal dua kali dalam sebulan.

**Kata kunci : evaluasi pemberdayaan masyarakat, program gerakan satu rumah satu jumantik**

---

## ABSTRACT

*The 1R1J movement in Tabalong Regency began in 2016 as outlined in the innovation "Sweep Aja DHF" with the implementation of Mass Abatization of Endemic Areas by larva monitoring officers. The research method uses descriptive qualitative. The main informants were the Head of the Tabalong Regency Health Office, the Head of the Disease Prevention and Control Division of the Tabalong Regency Health Service, and the Head of the Community Health Center. The triangulation informants were the Village Head, Jumantik Cadre, and Jumantik Rumah. The results of the research input components: human resources namely jumantik cadres, sources of funds namely APBD, DAK, BOK and, fund Village, infrastructure in the form of giving abate powder. Process components: planning, namely increasing the number of jumantik cadres in each RT/Village, implementation, namely the results of regular larvae reports by jumantik cadres every 3 months. Output components: monitoring, namely the role of cadres having a major influence in providing G1R1J outreach, as evidenced by the reduction in morbidity and mortality in DHF cases, evaluation, namely the addition of larva-free competition area coverage. Suggestions for expanding the scope of the larva-free competition and for more active jumantik cadres in providing outreach to the community at least twice a month.*

**Keywords:** *community empowerment evaluation, jumantik one house one movement program*

## REFERENSI

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4636/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Dewasa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 Tentang Standar Buku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendalian.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021

WHO. 2016. *Dengue and Severe Dengue*, World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-engue>>.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Profil Kesehatan Indonesia 2018*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 2022. *Profil Kesehatan Kalimantan Selatan 2022*
- Fidayanto, R., Susanto, H., Yohanah, A., & Yudhastuti, R. 2013. *Control Model of Dengue Hemorrhagic Fever*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(11), 522–528.
- Yuningsih, R. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Djannah, N.N., 2019. *Membangun Masyarakat Bebas Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kampung Gadel Kelurahan Karangpoh Surabaya*
- Kepmenkes RI Nomor 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor :581/MENKES/SK/VII/1992 Menyatakan Bahwa Biaya Yang Diperlukan Untuk Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dibebankan Kepada Masing-Masing Instansi/Lembaga
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Buletin Jendela Epidemiologi Demam Berdarah Dengue. Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI*, 2, 1
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M-Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. pg. 35-53.
- Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 443.42/4850/P2P/Dinkes/11/2018 Nomor 443.2/5132-P2P/Dinkes/08/2022 *Kewaspadaan Dini Terhadap Demam Berdarah Dengue di Kalimantan Selatan Dalam Upaya Meningkatkan dan Mengintensifkan Gerakan Masyarakat (GERMAS) yaitu Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) serta Peran Lintas Sektor dan Lintas Program Sebagai Implementasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus*.
- Bupati Tabalong Nomor 1220/Dinkes/P2P/443.42/10/2018 Nomor 0070/Dinkes/ BIDP2P.443.2/01/2020 Nomor B.1064/Dinkes/P2P/443.2/04/ 2021 Nomor B.2740/Dinkes/Bid-P2PKJN/443.2/08/2022, yaitu Gerakan SAPU AJA DBD (SAPUluh manit Abatisasi Jajantik Aedes Demam Berdarah Dengue), sebagai Implementasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus dengan Gerakan 1R1J (1 Rumah 1 Jumantik) SAPU = Bersihkan, SAPU = SAPUluh manit = 10 menit.
- Rini, W.N.E. 2020. *Upaya Pencegahan DBD Dengan Gerakan satu Rumah Satu Jumantik Dalam Mewujudkan Masyarakat Peduli Sehat*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Petunjuk Teknis Implementasi PSN 3M-Plus dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*. pg. 35-53.
- Cahyo AN, Satus A, Wibowo H. 2015. *Gambaran pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan 3M dalam pencegahan penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) oleh keluarga*. *J Ilmu Keperawatan*. 2015; 1(1):6 – 12
- Asri NK. *We Need A Bigger Bomb: A community attempt on fighting dengue fever in a suburban Surabaya, Indonesia*. *Proceeding ICMHS*. 2016; 246–249.
- Irma Rubianti, A.A.S.Sawitri, I Ketut Gita. 2017. *valuasi Peran Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Dalam Pemberantasan Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Denpasar Tahun 2017*. *Oryza Jurnal Pendidikan Biologi*. Volume 8 Nomor 2 November 2019
- Rahmi, Yuningsih. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue*. *Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial* . Volumen 9 (2) Desember 2018.
- Faizah, A. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Puskesmas Mojosongo Kabupaten Boyolali tahun 2018*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e Journal)*, ISSN: 2356-3346
- Steva, T. 2015. *Analisis Pelaksanaan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Minahasa Utara*
- Rosidi R dan Adisasmito W. 2012. *Hubungan Faktor Penggerak Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue dengan Angka Bebas Jentik Di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.01.11/MENKES/591/2016 pada tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus dengan “Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik”
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022. *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2022*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan